



Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun di Desa Pakis

Implementation of the 12 Year Compulsory Education Program in Pakis Village

Pipit Pratiwi¹, Edhi Siswanto²

^{1,2}Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Jember, Jember, Indonesia
seofionanda@gmail.com, edhisiswanto@unmuhjember.ac.id

Abstrak

Pemerintah mengumatakan nilai pendidikan pada semua lapisan masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan sebagai bagian dari perannya dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pendidikan formal dalam program wajib belajar 12 tahun di desa pakis. Wawancara dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data, dan analisis deskriptif digunakan sebagai metode analisis data. Berdasarkan temuan penelitian, pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di Desa Pakis Kabupaten Jember (2022-2023) tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Tantangan pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun antara lain tingkat pendapatan orang tua yang relative rendah, jenis pekerjaan orang tua, dan waktu yang dibutuhkan anak untuk menempuh perjalanan dari rumah ke sekolah membutuhkan waktu 10-15 menit dengan jarak tempuh 3km-5km setiap hari dengan berjalan kaki ataupun berkendara. Penelitian ini menyarankan bahwa Dinas Pendidikan harus menjamin bahwa masyarakat mendapat informasi tentang program wajib belajar 12 tahun dan bahwa Negara bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan gratis kepada anak-anak dari latar belakang yang kurang mampu.

Kata kunci: Pendidikan; Wajib Belajar 12 Tahun; Pelaksanaan

Abstract

The government publicizes the value of education to all levels of society through improving the quality of education as part of its role in society. This study aims to explain how formal education in the 12-year compulsory education program in Pakis village. Interviews and documentation were used as data collection methods, and descriptive analysis was used as the data analysis method. Based on the research findings, the implementation of the 12-year compulsory education program in Pakis Village, Jember Regency (2022-2023) has neither increased nor decreased. Challenges to the implementation of the 12-year compulsory education program include the relatively low income level of parents, the type of work of parents, and the time it takes children to travel from home to school takes 10-15 minutes with a distance of 3km-5km every day by walking or driving. This study suggests that the education office should ensure that the community is informed about the 12-year compulsory education program and that the state is responsible for providing free education to children from disadvantaged backgrounds.

Keywords: Education; Compulsory Education 12 Years; Implementation

I. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan unsur terpenting dalam pembangunan nasional, karena pendidikan masyarakat meningkatkan kemampuan berpikir masyarakat. Pemikiran sosial yang berkembang menciptakan manajemen sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Pendidikan juga bagian dari peran pemerintah. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan, pemerintah memprioritaskan pentingnya pendidikan di semua lapisan masyarakat. Pemerintah berkewajiban memenuhi hak setiap warga negara untuk memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Masalah pendidikan merupakan masalah yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Akibatnya, banyak anak Indonesia yang tidak bisa melanjutkan sekolah atau putus sekolah. Faktor terbesar yang mempengaruhi putus sekolah adalah masalah keuangan (Asmara & Sukadana, 2016; Dewi et al., 2014; Pandu et al., 2022; Sarfa, 2016; Sekolah & Menengah, 2021). Masalah keuangan keluarga kecil menyebabkan rendahnya motivasi anak untuk mengikuti pendidikan. Semakin baik keuangan keluarga, semakin baik pula kesempatan anak untuk ikut belajar.

Masyarakat di desa biasanya berprofesi sebagai petani atau petani, meskipun ada juga pekerjaan lain seperti tukang kayu atau tukang batu dan profesi lainnya. Sering terdapat bukti bahwa pekerja non-pertanian kembali ke pertanian ketika musim tanam tiba. Mereka bekerja di luar ladang hanya untuk sementara, bila pekerjaan lapangan belum selesai, kemudian keluar ladang. Karena situasi kerja yang tidak stabil seperti itu, pendapatan bulanan tidak optimal. Sehingga mempengaruhi pembiayaan pendidikan lanjutan anak-anaknya.

Desa Pakis merupakan desa wisata yang saat ini telah dikenal oleh masyarakat luar yang terletak pada Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Destinasi wisata pakis saat ini yaitu Kampung Durian. Desa Pakis juga memiliki salah satu organisasi yang diberi nama Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Lembaga tersebut dibentuk pada tahun 2005 oleh salah satu tokoh masyarakat yang berperan aktif terhadap kelompok tani dan beliau yang membuat lembaga tersebut untuk melakukan kerjasama dengan pihak perhutani. Lembaga Masyarakat Desa Hutan Rengganis bekerjasama dengan pihak perhutani melalui beberapa program salah satunya system Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Desa Pakis. Semakin berjalannya waktu Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Rengganis telah di Ganti dengan KPS Rengganis yaitu Kelompok Perhutanan Sosial Rengganis.

Sebelum adanya Lembaga Masyarakat Desa Hutan (PHBM) kondisi awal Desa Pakis pada tahun 1995 terjadi krisis moneter hingga tahun 2000. Menurut bapak Munawaruh selaku penggerak PHBM, Masyarakat mengalami kesulitan dalam mencari kebutuhan sehari-hari. Hal ini menyebabkan banyak sekali faktor, dari segi ekonomi yang sulit, pendidikan

anak, bahkan kesehatan. Untuk dari segi pendidikan para petani hutan mayoritas pendidikan terakhir adalah Sekolah Dasar (SD) hal ini dikarenakan yang pertama karena faktor ekonomi yang membuat mereka tidak dapat melanjutkan sekolah hingga tingkat yang lebih tinggi. Akan tetapi pasca adanya KPS Rengganis perubahan ekonomi para petani tidak membuat berubahnya cara pandang masyarakat terhadap pentingnya pendidikan formal. Ada beberapa masyarakat yang melakukan pernikahan di usia dini hal tersebut karena faktor dari keluarga yang beranggapan bahwa setelah lulus Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP) sudah cukup dengan pendidikan yang dijalani. Ini berkaitan dengan tingkat pendidikan yang masih rendah dan pentingnya pendidikan formal bagi anak.

Tingkat pendidikan suatu daerah sebenarnya ditentukan oleh bentuk daerah atau kota tersebut. Jika bentuk suatu kawasan memuat pola, tatanan atau organisasi dan permukiman yang terpisah dari kawasan tersebut. Oleh karena itu, bentuk desa sangat mempengaruhi atau menentukan tingkat perkembangan pendidikan (Maringan et al., 2016; Samaun, R., Bakri, B., & Mediansyah, 2021). Seringkali bentuk desa terkait erat dengan karakteristik sosial dan budaya yang dominan di wilayah tersebut. Sehingga kebutuhan esensial, tingkat pengetahuan dan tingkat teknis penduduk desa seringkali mempengaruhi desain dan penentuan tampilan (ruang) desa. Sebagian besar masyarakat tidak percaya akan pentingnya pendidikan, sehingga banyak anak yang tidak bersekolah atau jarang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (Annisa et al., 2022; Hukama, 2017; Jamaluddin et al., 2022; Rahmayani, 2021). Hal ini dapat terjadi karena orang tua beranggapan bahwa sekolah itu sangat sulit, membuang banyak waktu dan uang, sehingga lebih memilih untuk bekerja atau membantu orang tuanya. Tujuan mereka di sekolah hanyalah untuk bisa membaca dan menulis, dan tujuan akhirnya adalah sudah bisa bekerja dengan lulusan SD, SMP atau SMA/ sederajat.

Perubahan yang saat ini terjadi di Desa Pakis dengan perekonomian masyarakat pedesaan yang berasal dari hasil pertanian membuat kehidupan baru para petani jauh lebih baik. Hasil pertanian sebagian harus dikembalikan ke sawah untuk membiayai penanaman berikutnya dan sebagian lagi untuk kebutuhan keluarga, dan harga hasil pertanian tidak selalu tetap. Tingkat pendidikan masyarakat pedesaan pada umumnya masih rendah, dimana sebagian besar pendidikan mereka hanya sampai tingkat SD, sehingga informasi pendidikan yang mereka ketahui juga terbatas, karena kesadaran masyarakat pedesaan tentang pendidikan formal masih tergolong rendah. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor, mengapa tingkat pendidikan formal di pedesaan masih rendah, salah satunya adalah faktor keadaan ekonomi. Fenomena demikian terjadi di Desa Pakis Kecamatan Panti, dimana sebagian besar penduduk desa ini berpendidikan rendah, pendidikan terakhir adalah SMA. Sementara mereka

ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi tidak tercapai karena dukungan orang tua yang tidak memperbolehkan untuk melanjutkan sekolah. Setelah menyelesaikan pendidikan sekolah, mereka membantu orang tua di ladang, ada juga yang bekerja sebagai PRT atau di TKI, dan ada juga yang bekerja di perusahaan swasta.

Pendidikan mempunyai peranan dalam segala aspek dinamika kehidupan manusia dan perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Namun kurangnya pengetahuan masyarakat Desa Pakis tentang pendidikan menyebabkan kurangnya minat masyarakat terhadap pendidikan, khususnya di perguruan tinggi, sehingga timbul persepsi bahwa pendidikan tidak terlalu penting. Tahap awal atau pendahuluan penelitian, peneliti melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi di Desa Pakis di temukan bahwa minat dan motivasi masyarakat dalam menyekolahkan anaknya terbilang rendah untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, kurangnya motivasi orang tua untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Masih banyak persepsi di masyarakat bahwa pendidikan anak dianggap kurang penting dibandingkan pendidikan tinggi, dan banyak persepsi masyarakat yang menempatkan anak untuk bekerja daripada pendidikan tinggi. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengetahui tentang penelitian “ Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun Di Desa Pakis”.

Rumusan masalah dalam suatu karya tulis atau upaya menjelaskan proses penulisan dalam suatu karya tulis sangat diperlukan, Berdasarkan latar belakang seperti diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana implementasi program wajib belajar 12 tahun di desa pakis terlaksana dan apa yang menjadi kendala terhambatnya program wajib belajar 12 tahun. Segala penelitian yang sifatnya akademis atau non-akademis memiliki tujuan penelitian masing-masing. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan mendeskripsikan hal-hal yang menjadi permasalahan, yaitu untuk memperoleh gambaran tentang implementasi program wajib belajar 12 tahun. Menerapkan kebijakan kepada masyarakat yang ikut lembaga masyarakat desa hutan adalah alat untuk upaya yang masih dalam tahap awal, seperti mendorong optimisme atau mensucikan hati. Politik menentukan kebebasan, yang pada gilirannya mencerminkan otoritas dan status dalam institusi. Deklarasi, wawasan, atau pengetahuan yang mengarahkan pikiran untuk membuat penilaian disebut sebagai kebijakan. Meskipun tidak semua kebijakan adalah pernyataan, inspektur sering menyiratkannya melalui tindakan mereka. Implementasi kebijakan yang efektif tidak dapat menghasilkan dampak yang signifikan, kemungkinan karena perencanaan yang buruk atau faktor lainnya. Tahapan yang paling penting dalam proses kebijakan publik adalah implementasi (Agustino, 2006; Djaba & Rachman, 2019; Lijan P. Sinambela, 2018; Marcelina et al., 2018; Ngabito et al., n.d., n.d.). Pemerintah negara bagian atau lokal menerapkan inisiatif atau kebijakan untuk meningkatkan kualitas tempat dan tanah. Ini dikenal sebagai implementasi. Untuk mendapatkan

dampak yang diinginkan dan untuk mencapai tujuan, inisiatif kebijakan harus dilakukan. Implementasi yang ceroboh akan menyebabkan hasil implementasi program yang buruk. Jika implementasi kebijakan memberikan hasil yang positif, maka bangsa juga akan mengalami perbaikan yang positif.

Terkait dengan penelitian sebelumnya, maka penelitian ini membahas mengenai implementasi program wajib belajar 12 tahun di desa pakis. Adapun kesamaan dari penelitian sebelumnya adalah sama-sama mengangkat tema implementasi, pendidikan nasional, persepsi masyarakat dan perbedaannya pada lokasi pengambilan data dan analisisnya.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh yang diteliti secara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dalam konteks alamiah yang khusus dan menggunakan berbagai metode ilmiah. Secara harfiah, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan (deskripsi) situasi atau peristiwa. Dalam pengertian ini, penelitian deskriptif adalah pengumpulan data dasar secara deskriptif, tetapi tidak perlu mencari atau menjelaskan hubungan, menguji hipotesis, membuat prediksi atau menarik makna dan kesimpulan, meskipun penelitian yang mencari hal-hal tersebut juga dapat mencakup metode deskriptif (Riduwan, 2018; Sugiyono, 2012, 2013, 2016, 2018b, 2018a).

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November s/d Desember 2022 di Desa Pakis, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah di Desa Pakis yang terdapat dibagian barat dari Kabupaten Jember. Topik kajian Persepsi Pandangan Masyarakat Pedesaan terhadap Pendidikan Formal di Desa Pakis, meliputi pandangan beragam warga Desa Pakis, Kecamatan Panti, dan Kabupaten Jember terhadap pentingnya pendidikan formal bagi anak. Orang yang menawarkan informasi dikenal sebagai informan. Desa Pakis adalah daerah bagian dari Desa penghasil kopi dan durian yang terbagi dalam enam dusun, dimana desa tersebut berada di ketinggian 450 mdpl sampai dengan 625 mdpl. Tempat penelitian yang dilakukan peneliti adalah Pakis Utara yang terdiri dari 5 (lima) RT sekitar Desa Pakis di wilayah tempat tinggal warga masyarakat Desa Pakis. Observasi dilakukan selama kegiatan berlangsung di tengah-tengah masyarakat khususnya di Desa Pakis. Teramati bagaimana aksi dan reaksi masyarakat telah memberikan umpan balik terhadap persepsi pendidikan formal. Selain itu, perlu juga dilakukan pengecekan terhadap keadaan lingkungan, sosial, ekonomi dan pendidikan pendahuluan di Desa Pakis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Salah satu permukiman di Kecamatan Panti adalah Desa Pakis. Di Kabupaten Jember, Desa Pakis, Kecamatan Panti, terletak di sebelah utara Gunung Argopuro. Desa Pakis merupakan dataran tinggi dengan batas wilayah sebagai berikut dan terletak 20 kilometer timur laut kota Jember pada koordinat 08.06595 Lintang Selatan dan 113.89885 Bujur Timur. Berada di ketinggian 450 hingga 625 meter di atas permukaan laut. Akses jalan menuju Desa Pakis tersedia dari kota Jember yang jaraknya sekitar 20 kilometer ke arah barat laut. Di Pakis, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, di dekat Jalan Rambutan No. 01, terdapat Pusat Pemerintahan Desa Pakis.

Pemrograman adalah tugas yang dilakukan untuk melakukan tugas tertentu di masa depan. Data kependudukan daerah harus digunakan untuk membantu program pembangunan. Efektivitas kebijakan pembangunan yang ditempuh juga dipengaruhi oleh informasi jumlah penduduk, persebaran, dan komposisi penduduk menurut berbagai kelompok umur menurut program.

Tabel 1. Banyaknya Rumah Tangga dan Anggota Rumah Tangga di Desa Pakis Kecamatan Panti Tahun 2022

No	Dusun	Banyaknya		Penduduk
		Kepala Keluarga	Anggota Keluarga	
1.	Dusun Cempaka	96	355	355
2.	Dusun Gludug	15	62	62
3.	Dusun Kahendran	21	78	78
4.	Dusun Karang Pakil	110	400	400
5.	Dusun Kemundung	30	119	119
6.	Dusun Kemuning	5	19	19
7.	Dusun Krajan	16	57	57
8.	Dusun Pakis Utara	193	470	470
9.	Dusun Tajek	4	14	14
10.	Dusun TM Glugo01	10	44	44
11.	Dusun TM Glugo02	5	18	18
Jumlah		505	1.636	1.636

Tuntutan keluarga menurun seiring bertambahnya ukuran keluarga, juga sebaliknya. Konsekuensinya, biaya kebutuhan yang harus dipenuhi akan meningkat seiring bertambahnya jumlah keluarga. Seperti yang diperlihatkan pada tabel1, dengan jumlah penduduk sekitar 1.636 jiwa dan luas wilayah 2.697 km², Desa Pakis akan memiliki kepadatan penduduk sebesar 1.636 jiwa per km² pada tahun 2022. Kepadatan penduduk berdampak pada kualitas hidup masyarakat karena memberikan kontribusi

terhadap beberapa hal yang berkaitan dengan masalah kependudukan, seperti kemiskinan, pengangguran, dan masalah lainnya.

Tabel 2. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pecaharian di Desa Pakis Kecamatan Panti

No	Dusun	Mata Pencaharian					
		Buruh	Guru	Jasa Perorangan	Petani	Perternak	Trasnportasi
1.	Cempaka	8	-	2	85	1	-
2.	Gludug	3	-	1	11	-	-
3.	Kahendran	-	-	-	21	-	-
4.	Karang Pakil	2	-	1	104	-	1
5.	Kemundungan	10	-	-	20	-	-
6.	Kemuning Lor	1	-	-	3	-	-
7.	Krajan	1	-	-	9	-	-
8.	Pakis Utara	32	1	23	132	1	2
9.	Tajek	-	-	-	4	-	-
10.	TM Glugo 01	-	-	1	9	-	-
11.	TM Glugo 02	-	-	-	5	-	-
Jumlah		57	1	28	403	2	3

Berdasarkan data pada tabel 2, penduduk Desa Pakis akan bekerja di bidang transportasi, jasa perorangan, tenaga kerja, pertanian, dan beternak pada tahun 2022. Jumlah penduduknya adalah 403 orang yang sebagian besar adalah petani. Sebanyak 28 warga Desa Pakis bekerja di industri jasa perorangan, 57 orang buruh, 3 warga di industri transportasi, dan 2 warga di industri peternakan.

B. Hambatan-Hambatan Pelaksanaan

Salah satu prakarsa pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah masing-masing negara adalah wajib belajar. Untuk mengakhiri kemiskinan dan meningkatkan kekayaan bersama, pendidikan sangat penting. Tujuan dari pendidikan dasar adalah untuk membekali siswa dengan pengetahuan dasar dan kemampuan yang mereka butuhkan untuk tumbuh sebagai manusia, anggota masyarakat, dan warga negara sambil meletakkan dasar untuk pendidikan menengah. Anak-anak diajarkan dasar-dasar pendidikan, termasuk membangun karakter dan kepribadian mereka, meningkatkan keimanan dan ketaqwaan mereka kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan menanamkan informasi dan kemampuan mendasar.

Tabel 3. Data Anak Tidak Sekolah di Desa Pakis

No	Desa	Tidak Sekolah		Alasan
		Perempuan	Laki-Laki	
1.	Panti	21	129	1. Faktor Ekonomi

tetap. Fenomena yang umum terjadi adalah kebanyakan orang tua menginginkan anaknya berhasil di sekolah dan di pekerjaannya sehingga nantinya dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

Faktor Jarak Rumah Ke Sekolah

Jarak antara rumah dan sekolah sekitar 10-15 menit. Jika suatu lembaga memasang pembatas jarak, berarti jarak dengan tempat tinggal dapat menghambat proses belajar siswa, artinya jarak dapat menentukan status siswa, terutama dalam mencapai hasil belajar. Jarak ke tempat tinggal merupakan faktor lingkungan, dan salah satu yang mempengaruhi perjalanan sekolah siswa adalah sarana yang digunakan. Dibutuhkan lebih banyak waktu dan usaha semakin jauh anak harus pergi ke sekolah dari rumah. Mengurangi waktu belajar adalah hasil dari ini.

Siswa sering menempuh jarak antara tiga dan lima kilometer (km) dari rumah mereka ke sekolah, dengan yang terdekat berjarak kurang dari satu kilometer. Siswa dengan kesulitan belajar, yang kurang terlibat dan bersemangat dalam belajar, dipengaruhi oleh lokasi rumah yang terlalu jauh dari sekolah (Rayani, 2020; Zainuri et al., 2020). Hal ini dapat diakibatkan oleh kondisi sehari-hari yang mengharuskan anak berjalan kaki ke sekolah, yang disebabkan oleh kondisi keuangan keluarga yang tidak memadai untuk memungkinkan pergi ke sekolah. Siswa yang sudah kelelahan sebelum berangkat ke sekolah kurang memiliki motivasi untuk melakukan kegiatan pembelajaran.

C. Pembahasan

Pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun

Tidak ada variasi tahunan jumlah siswa SMA/MA (16–18 tahun) dan APK di satuan pendidikan APM. Karena program ini bergerak ke arah itu, maka kondisi ini berdampak signifikan terhadap perkembangan ekonomi dan sumber daya manusia. Program wajib belajar 12 tahun di Desa Pakis memiliki sejarah tidak berhasil dilaksanakan. Meski masih ada tantangan, upaya kreatif terus dilakukan untuk mengatasinya. Sekolah-sekolah Desa Pakis telah melakukan tugasnya dengan baik. Sekolah yang familiar dengan program ini membantu anak dan orang tua memahaminya, mencegah anak putus sekolah, menawarkan data siswa untuk uang BOP (Bantuan Operasional Pendidikan), dan tentu saja melaporkan penggunaan dana BOP.

BOP ingin menyukseskan program wajib belajar 12 tahun agar tidak ada lagi anak yang putus sekolah karena kendala biaya (Elyasa, 2016; Griadhi, 2018; Kusuma, 2015; Rofiah & Kurniawan, 2017; Rusma Putri Nurjati, 2020; Siswanto, 2017). Namun, sekolah tetap mengalami permasalahannya sendiri, salah satunya adalah sering terlambat dari jadwal saat memulai tahun ajaran. Pembayaran BOP untuk sekolah tertunda akibat

berlarut-larutnya pengesahan APBD oleh pemerintah pada setiap awal tahun. Sekolah terpaksa menunda kegiatan akademiknya akibat tertundanya dana BOP karena kegiatan tersebut semata-mata bergantung pada anggaran neraca pembayaran pemerintah untuk pelaksanaannya.

Namun kenyataannya, masih banyak anak-anak di dusun tersebut yang tidak mengenyam pendidikan SMA. Di Desa Pakis masih terdapat anak yang tidak bersekolah karena beberapa hal seperti tingkat pendidikan orang tua, tingkat pendapatan, jumlah tanggungan, lingkungan, tempat tinggal, waktu tempuh ke sekolah, infrastruktur jalan, dan transportasi.

Hambatan-hambatan Pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun

Hasil survey wawancara kepada salah satu penggerak lembaga masyarakat desa hutan yang telah penulis lakukan pada tahun 2022 bulan November disajikan sebagai berikut; "Orang tua Desa Pakis memiliki tingkat pendapatan yang rendah, sehingga memungkinkan orang tua dari anak yang tidak bersekolah dicap sebagai orang yang lemah secara ekonomi. Tidak ada dana untuk pendidikan anak karena pendapatan orang tua tidak cukup untuk menutupi bahkan pengeluaran pokok (pakaian dan makan). Anak-anak dalam posisi ini tidak mampu menyelesaikan pendidikannya, misalnya karena kekurangan uang untuk membeli buku pelajaran, perlengkapan sekolah, dan alat belajar lainnya. Penyelesaian wajib belajar 12 tahun terkendala oleh situasi ini, yang jelas memprihatinkan dan menuntut perhatian berbagai pihak yang bertugas untuk menyukseskan dan menuntaskan wajib belajar 12 tahun. 70% orang tua telah menyelesaikan setidaknya 12 tahun sekolah dasar, yang merupakan rata-rata tingkat pendidikan dasar. Orang tua yang tidak berpendidikan kurang mengetahui pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Kelanjutan pendidikan formal orang tua mempengaruhi pendidikan anak-anaknya. Anak-anak terinspirasi dan termotivasi untuk maju dengan ini".

Tingkat pendidikan orang tua mempengaruhi pekerjaan atau mata pencaharian mereka. Karena letak Desa Pakis yang berada di dataran tinggi di kaki Gunung Argopuro, diketahui mayoritas orang tua di sana berprofesi sebagai petani. Hal ini berdampak pada mata pencaharian penduduk setempat. Keluarga yang terdiri dari laki-laki, perempuan, dan keturunannya yang sudah dewasa, merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga tidak dapat dianggap utuh jika salah satu komponen tersebut hilang, seperti ibu hadir tetapi ayah tidak ada (karena kematian atau perceraian). Hal ini disebut sebagai integritas struktural keluarga. Akibatnya, ada kelengkapan dalam hubungan itu, yaitu adanya interaksi sosial yang wajar (harmonis).

Perkembangan sosial anak tentunya terhambat oleh ketidaksempurnaan keluarga. Keluarga merupakan komponen yang sangat menentukan masa depan anak, oleh karena itu lingkungan keluarga sangat berpengaruh. 61% rumah di wilayah penelitian memiliki kondisi tempat tinggal yang tidak memadai, menurut data observasi. Di lokasi yang diteliti,

rata-rata 80% rumah memiliki kondisi tempat tinggal yang kotor. Pemukiman adalah bagaimana lingkungan direpresentasikan di wilayah penelitian.

Ukuran aksesibilitas mencakup volume lalu lintas dan kemudahan budidaya. Keinginan siswa untuk bersekolah dipengaruhi oleh kedekatan rumahnya dengan sekolah. Interaksi dan pertumbuhan wilayah semakin mudah semakin dekat jarak antar tempat. Anak-anak sering berjalan kaki sejauh 3 hingga 5 kilometer ke sekolah, dan moda transportasi yang umum digunakan adalah mobil pribadi. Namun, tidak semua anak memiliki akses ke mobil pribadi, oleh karena itu beberapa harus menempuh jarak ini. Temuan studi menunjukkan bahwa aksesibilitas memiliki pengaruh yang signifikan, dan aksesibilitas Desa Pakis dinilai rendah.

Dinamika keluarga menjadi kendala lain dalam pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di Desa Pakis. Program wajib belajar 12 tahun harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan faktor keluarga. Populasi keluarga yang besar di wilayah ini berdampak pada selesai atau tidaknya anak-anak muda menyelesaikan pendidikan mereka. Biasanya ada 4-5 orang per keluarga inti di Desa Pakis. Biaya dan kebutuhan yang harus dipenuhi meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah tanggungan dalam rumah tangga. Setiap anggota keluarga memiliki tuntutan yang beragam, seperti yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan pendidikan.

IV. KESIMPULAN

Pada tahun 2022-2023, program wajib belajar 12 tahun di Desa Pakis, Kabupaten Jember, masih tetap berjalan, dan tidak ada perluasan kurikulum. Berikut ini adalah beberapa kendala dalam pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di Desa Pakis, Kabupaten Jember: tingkat pendapatan orang tua yang rendah, yaitu kurang dari Rp 1.000.000; jenis pekerjaan orang tua rata-rata sebagai petani; beberapa keluarga mendukung kehadiran anak-anak mereka di sekolah; waktu yang dibutuhkan anak untuk menempuh perjalanan dari rumah ke sekolah adalah 20 menit dengan jarak tempuh 3 km-5 km; dan tingkat pendidikan terakhir orang tua rata-rata adalah tingkat sekolah dasar. Saran kepada Dinas Pendidikan harus memastikan secara teliti mengenai informasi program wajib belajar 12 tahun agar sampai kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui informasi terbaru, negara bertanggungjawab atas anak-anak yang kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan gratis dan tidak ada alasan bagi peserta didik yang tidak mampu tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Sekolah lebih meningkatkan kegiatan mensosialisasikan kepada orangtua siswa tentang adanya dana yang disiapkan oleh pemerintah untuk membantu orangtua yang tidak mampu membiayai anaknya melanjutkan sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Van Horn: The Policy*. <http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf>
- Annisa, N., Bariah, O., & Sitika, A. J. (2022). Persepsi Masyarakat Terhadap Pentingnya Pendidikan Tinggi Kaum Perempuan (Studi Kasus di Kecamatan Pakusarakan Kabupaten Karawang). *I S L A M I K A Jurnal Keislaman Dan Ilmu Pendidikan*, 4(4), 871–882.
- Asmara, Y. R. I., & Sukadana, I. W. (2016). Mengapa Angka Putus Sekolah Masih Tinggi? (Studi Kasus Kabupaten Buleleng Bali). *E-Journal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 5(12), 1347–1383. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/download/23557/16727>
- Dewi, N. A. K., Zukhri, A., & Dunia, I. K. (2014). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah 2012 / 2013. *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi*, 4(1), 1–12. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPE/article/view/1898>
- Djaba, M., & Rachman, E. (2019). Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantas Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). *PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 6(2), 83–93.
- Elyasa. (2016). Evaluasi Implementasi Kebijakan Program Wajib Belajar 12 Tahun Di Kota Depok Jawa Barat (Studi Kasus Pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri). *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 7(2), 1377–1388.
- Griadhi, N. (2018). Implementasi Pengaturan Hak Konstitusional Anak Dalam Pemenuhan Wajib Belajar 12 Tahun Di Provinsi Bali. *Vyavahara Duta*, 1, 47–56. <http://www.ejournal.ihtn.ac.id/index.php/VD/article/view/686%0Ahttp://www.ejournal.ihtn.ac.id/index.php/VD/article/download/686/572>
- Hukama, A. F. (2017). Persepsi Masyarakat Pedesaan Terhadap Pendidikan Tinggi (Studi Analisis Teori George Herbert Mead). *J-PIPS (Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial)*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.18860/jpips.v4i1.7298>
- Jamaluddin, J., Quthny, Y. A., & Bahrudin, B. (2022). Persepsi Masyarakat Terhadap Pentingnya Pendidikan Pada Remaja Di Desa Liprak Kidul Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Probolinggo. *Pendekar: Jurnal Pendidikan Berkarakter*, 5(2), 105. <https://doi.org/10.31764/pendekar.v5i2.9980>
- Kusuma, W. W. (2015). Implementasi Program wajib Belajar 12 Tahun Di Provinsi DKI Jakarta (Studi Kota Administrasi Jakarta Timur). *Journal Of Politic and Government Studies*, 1–18.
- Lijan P. Sinambela. (2018). *Reformasi Pelayanan Publik : Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Bumi Aksara, Jakarta.

- Marcelina, M., Kalalo, K., Kimbal, M., & Kimbal, A. (2018). Implementasi Kebijakan Pembangunan Terminal Tatelu Di Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara. *Eksekutif*, 1(1), 1–11.
- Maringan, K., Pongtuluran, Y., & Maria, S. (2016). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Sikap Kerja Dan Keterampilan Kerja Terhadap Prestasi Kerja Karyawan Pt. Wahana Sumber Lestari Samarinda. *AKUNTABEL: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 13(2), 135–150. <http://journal.feb.unmul.ac.id>
- Ngabito, N., Razak, D. A., & Raf, B. (n.d.). Implementasi Program Bantuan Rumah Hunian Bagi Masyarakat Miskin Di Provinsi Gorontalo Implementation of the Residential Housing Assistance Program for the Poor in Gorontalo Province berbagai program untuk mengatasinya . Salah satu program pengentasan Hun. *Provider Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 02(September 2023), 76–93.
- Pandu, K. T., Aminuyati, A., & Atmaja, T. S. (2022). Analisis Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah Jenjang Sekolah Menengah Pertama Di Desa Maju Karya Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, 13(2), 543. <https://doi.org/10.26418/j-psh.v13i2.57605>
- Rahmayani, M. (2021). Persepsi Masyarakat Terhadap Pentingnya Pendidikan Tinggi untuk Kaum Perempuan. *Jurnal Sosial Sains*, 1(9), 3635–3641. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v1i9.169>
- Rayani, E. (2020). Survey Tentang Kebijakan Pemerintah Terhadap Jarak Sekolah dengan Rumah Menurut Prespektif Orang Tua. *Jurnal Pendidikan Kebutuhan Khusus*, 4(2), 34–37. <https://doi.org/10.24036/jpkk.v4i2.561>
- Riduwan. (2018). *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Rofiah, N. H., & Kurniawan, M. R. (2017). Kesiapan Guru dalam Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun di Sekolah Inklusi. *Urecol*, 343–348.
- Rusma Putri Nurjati. (2020). *Pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun Di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Tahun 2018 Skripsi*.
- Samaun, R., Bakri, B., & Mediansyah, A. R. (2021). Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 1, 18–33.
- Sarfa, W. (2016). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah di Kampung Warga Negeri Hative Kecil Kota Ambon. *Al-Iltizam*, 1(2), 93–113.
- Sekolah, A. P., & Menengah, J. S. (2021). *Sekolah Menengah*. 2(2).
- Siswanto, A. (2017). Pelaksanaan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun Pada Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Bantul. *Jurnal Hanata Widya*, 6(2), 55–65.

- Sugiyono. (2012). *Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018a). *Memahami penelitian kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. (2018b). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Alfabeta.
- Zainuri, M., Matsum, J. H., & Thomas, Y. (2020). Tingkat Pendapatan, sosial, Budaya dan Jarak Rumah dengan Sekolah sebagai Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 3(10), 1–15.